




Research Article

Analisis Manajemen Pembiayaan dalam Menunjang Penyelenggaraan Pendidikan Islam (Literature Review)

Yeni Fitriani¹, M. Kholid Tohiri²

1. UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Indonesia
2. STIT Misbahudin Ahmad, Indonesia

Correspondent: yennif@gmail.com 



Copyright © 2024 by Authors, Published by Jurnal Ilmiah Pengayaan dan Pembelajaran. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : August 22, 2024
Accepted : October 24, 2024

Revised : September 30, 2024
Available online : November 01, 2024

How to Cite: Fitriani, Y., & Tohiri, K. (2024). Analisis Manajemen Pembiayaan dalam Menunjang Penyelenggaraan Pendidikan Islam (Literature Review). *Jurnal Ilmiah Pengayaan Pembelajaran Dan Pendidikan Islam*, 1(1), 24-33. <https://doi.org/10.6166/jipp.viii.7>

Abstrak. Manajemen pembiayaan pendidikan merupakan aspek penting dalam memastikan penggunaan dana secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel di lembaga pendidikan. Studi ini menggunakan metode penelitian kepustakaan untuk menganalisis fungsi utama manajemen pembiayaan, yaitu anggaran (budgeting), pembukuan (accounting), dan pengawasan (auditing), serta penerapan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan pendidikan. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan ketiga fungsi tersebut, jika dilakukan dengan tepat, dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan lembaga pendidikan Islam dan mendukung pencapaian tujuan pendidikan. Kesimpulannya, pengelolaan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip yang sejalan dengan aturan pemerintah ataupun prinsip Islam akan meningkatkan kepercayaan publik dan mendukung tercapainya pendidikan yang berkualitas dan merata.

Kata Kunci: Manajemen Pendidikan, Pembiayaan, Pendidikan Islam

PENDAHULUAN

Pembiayaan dalam pendidikan merupakan salah satu isu yang sangat penting karena mempengaruhi berbagai sektor lain dalam proses pembelajaran. Setiap komponen pendidikan, mulai dari fasilitas, tenaga pengajar, hingga teknologi yang digunakan, sangat bergantung pada anggaran yang tersedia. Oleh karena itu, pengelolaan pembiayaan pendidikan harus dilakukan secara tepat dan transparan agar dapat mendukung kelancaran kegiatan belajar mengajar. Masalah utama dalam pembiayaan pendidikan adalah keterbatasan anggaran yang sering kali tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan pendidikan yang berkualitas. Anggaran pendidikan di banyak negara, terutama di negara-negara berkembang, masih terbilang rendah dibandingkan dengan kebutuhan yang sebenarnya. Ini berdampak pada terbatasnya fasilitas pendidikan, rendahnya gaji guru, serta kurangnya akses terhadap teknologi pendidikan yang modern. Akibatnya, kualitas pendidikan di beberapa daerah masih sangat tertinggal (Abdulatif, 2021).

Pembiayaan pendidikan juga erat kaitannya dengan manajemen keuangan yang efektif. Dalam sistem pendidikan, alokasi anggaran yang tidak efisien dapat menyebabkan ketidakseimbangan antara kebutuhan sekolah dan sumber daya yang tersedia. Sekolah-sekolah di daerah terpencil, misalnya, sering kali menerima anggaran yang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan sekolah di perkotaan, meskipun memiliki kebutuhan yang sama mendesaknya. Permasalahan ini semakin diperparah dengan fakta bahwa pendidikan saat ini menjadi semakin mahal. Banyak orang tua dan wali murid yang kesulitan untuk membiayai pendidikan anak-anak mereka karena tingginya biaya pendidikan, baik di jenjang dasar, menengah, maupun perguruan tinggi. Biaya yang harus dikeluarkan mencakup uang pangkal, SPP, biaya buku, seragam, hingga keperluan tambahan lainnya seperti kegiatan ekstrakurikuler. Hal ini menjadi beban yang sangat berat bagi keluarga dengan pendapatan rendah (Syaipudin et al., 2024).

Bagi banyak siswa, ketidakmampuan untuk membayar biaya pendidikan ini menjadi penghalang untuk mendapatkan akses pendidikan yang layak. Siswa-siswa dari keluarga kurang mampu sering kali harus putus sekolah karena tidak mampu membayar biaya pendidikan. Ini menjadi salah satu penyebab tingginya angka putus sekolah, terutama di daerah-daerah yang kurang berkembang. Ketidaksetaraan dalam akses pendidikan ini berpotensi memperlebar kesenjangan sosial di masa depan. Upaya pemerintah dalam mengatasi masalah pembiayaan pendidikan telah dilakukan melalui berbagai program, seperti bantuan pendidikan dan subsidi biaya pendidikan. Program seperti KIP (Kartu Indonesia Pintar) di Indonesia, misalnya, bertujuan untuk memberikan akses pendidikan bagi siswa-siswa dari keluarga tidak mampu. Meskipun program-program tersebut membantu, tantangan dalam

implementasi di lapangan masih sering terjadi, terutama dalam hal distribusi bantuan yang tidak merata (Waruwu et al., 2022).

Selain upaya dari pemerintah, pihak swasta dan masyarakat juga berperan penting dalam pembiayaan pendidikan. Beberapa yayasan dan lembaga filantropi menyediakan beasiswa bagi siswa berprestasi namun kurang mampu secara finansial. Selain itu, sekolah-sekolah swasta juga berusaha menekan biaya pendidikan dengan mencari sumber pendanaan lain, seperti sponsor dari perusahaan atau kerjasama dengan lembaga internasional. Pada akhirnya, masalah pembiayaan pendidikan merupakan masalah kompleks yang memerlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Solusi yang komprehensif dan berkelanjutan sangat dibutuhkan agar setiap anak, tanpa memandang latar belakang ekonomi, dapat memperoleh pendidikan yang berkualitas. Ini adalah investasi jangka panjang yang akan menentukan masa depan bangsa (Sandre et al., 2021).

Konstitusi Indonesia mengamanatkan alokasi minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk sektor pendidikan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa masyarakat dapat menikmati pelayanan pendidikan yang layak, khususnya pada jenjang pendidikan dasar yang menjadi hak setiap warga negara. Hal ini menunjukkan komitmen negara dalam memberikan pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyatnya, serta menegaskan pentingnya pendidikan sebagai salah satu pilar pembangunan nasional (Syaipudin & Luthfi, 2024).

Alokasi anggaran 20% ini seharusnya mampu dimanfaatkan secara efektif dan efisien untuk mendukung berbagai kebutuhan pendidikan. Kebutuhan tersebut meliputi penyediaan fasilitas fisik seperti gedung sekolah, peralatan belajar, dan akses terhadap teknologi pendidikan. Selain itu, anggaran juga digunakan untuk meningkatkan kualitas tenaga pengajar melalui pelatihan dan kesejahteraan guru, serta untuk mendukung program-program pendidikan yang inovatif. Pengelolaan anggaran yang baik akan berkontribusi pada terciptanya lingkungan belajar yang kondusif bagi siswa dan pendidik. Tujuan penelitian ini yaitu: 1) Menganalisis implementasi fungsi manajemen pembiayaan pendidikan. 2) Mengidentifikasi prinsip manajemen pembiayaan dalam menunjang penyelenggaraan pendidikan yang maksimal.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian kepustakaan adalah pendekatan yang mengandalkan penelaahan sumber-sumber tertulis, seperti buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, artikel, dan dokumen lainnya yang relevan dengan topik yang diteliti (Moleong, 2015). Dalam konteks manajemen pembiayaan pendidikan, metode ini digunakan untuk mengumpulkan informasi dan data dari literatur yang ada terkait pengelolaan

anggaran pendidikan. Peneliti dapat melakukan kajian terhadap teori-teori, konsep, serta hasil penelitian sebelumnya yang membahas manajemen keuangan pendidikan, khususnya yang berhubungan dengan pengalokasian, penggunaan, dan evaluasi dana pendidikan. Tujuannya adalah untuk memahami model atau praktik manajemen pembiayaan yang telah diterapkan, serta untuk mengidentifikasi tantangan dan solusi yang relevan (Sugiyono, 2022).

Penelitian kepustakaan memungkinkan peneliti untuk menganalisis kebijakan pembiayaan pendidikan, baik yang bersumber dari anggaran negara maupun dari sektor lain, serta mengevaluasi efektivitas implementasinya. Kajian utama dalam metode ini adalah menelaah bagaimana teori manajemen keuangan diterapkan dalam konteks pembiayaan pendidikan, dan bagaimana prinsip-prinsip efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas dapat mempengaruhi keberhasilan pengelolaan dana pendidikan. Dengan mengacu pada literatur yang luas, penelitian ini dapat menghasilkan wawasan yang komprehensif mengenai manajemen pembiayaan, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem pengelolaan anggaran pendidikan di masa mendatang.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi fungsi manajemen pembiayaan pendidikan

Sulistiyono dan Maisaroh membagi fungsi manajemen pembiayaan pendidikan ke dalam tiga bagian penting, yaitu anggaran (budgeting), pembukuan (accounting), dan pengawasan (auditing). Masing-masing bagian memiliki peran yang signifikan dalam memastikan bahwa dana pendidikan dikelola dengan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Manajemen yang baik akan memungkinkan lembaga pendidikan untuk menjalankan program-programnya secara optimal, menghindari penyalahgunaan anggaran, serta meningkatkan kualitas layanan pendidikan yang diberikan (Sari & Madio, 2021).

Fungsi pertama, anggaran (budgeting), merupakan rencana kegiatan atau proyek yang mencakup pengeluaran biaya dalam periode tertentu. Anggaran memainkan peran yang sangat penting dalam proses perencanaan (planning), pengendalian (controlling), serta evaluasi (evaluating) berbagai kegiatan di sekolah atau lembaga pendidikan. Penyusunan anggaran, seperti Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS), harus dilakukan dengan benar dan mengikuti beberapa langkah, seperti menginventarisir rencana yang akan dilakukan, membuat skala prioritas, menetapkan program kerja, menghitung dana yang dibutuhkan, serta menentukan sumber dana yang akan digunakan untuk membiayai program-program tersebut. Dengan perencanaan anggaran yang baik, pengelolaan keuangan sekolah dapat lebih terstruktur dan tepat sasaran (Kurniasih et al., 2021).

Langkah-langkah dalam penyusunan anggaran harus memperhatikan beberapa aspek penting. Pertama, tujuan yang jelas perlu ditentukan agar anggaran yang disusun sesuai dengan kebutuhan lembaga. Selanjutnya, estimasi kebutuhan masa depan harus dilakukan dengan cermat untuk memastikan anggaran mencakup semua aspek yang dibutuhkan dalam jangka panjang. Penilaian kebutuhan harus dilakukan untuk memastikan tidak ada yang terlewat, dan akhirnya, rencana tersebut harus diimplementasikan secara efektif dan sesuai dengan anggaran yang telah disusun (Farida wt al., 2023). Setiap langkah ini penting agar pengelolaan anggaran berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

Fungsi kedua, pembukuan (accounting), melibatkan pencatatan semua transaksi keuangan yang terjadi di lembaga pendidikan. Pembukuan dilakukan untuk menggambarkan hasil dari kegiatan ekonomi yang berlangsung di lembaga, termasuk bagaimana sumber daya diubah menjadi barang dan jasa untuk keperluan operasional pendidikan. Sistem pembukuan meliputi beberapa catatan akuntansi, seperti buku besar, jurnal, buku cek, serta proses dan prosedur akuntansi yang ditetapkan oleh lembaga. Pembukuan yang akurat membantu memastikan bahwa setiap transaksi keuangan dicatat dengan benar, tepat waktu, dan sesuai dengan standar yang berlaku (Darsono et al., 2020).

Pembukuan keuangan di lembaga pendidikan dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan meliputi pencatatan dana yang masuk ke lembaga pendidikan, sementara pengeluaran mencakup semua biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan pendidikan, seperti pembelian sarana dan prasarana, pembayaran gaji guru, serta kebutuhan operasional lainnya (Pratama et al., 2023). Fungsi pembukuan yang baik akan mencegah terjadinya penyalahgunaan dana, pemborosan, serta defisit keuangan, sehingga anggaran pendidikan dapat dikelola dengan lebih baik dan lebih akuntabel.

Fungsi ketiga, pengawasan (auditing), bertujuan untuk memastikan bahwa transaksi keuangan yang telah dicatat sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum. Pengawasan melibatkan proses pengumpulan dan pengevaluasian bukti-bukti informasi keuangan yang dapat diukur, yang dilakukan oleh auditor yang kompeten dan independen. Tujuan utama dari pengawasan ini adalah untuk menilai apakah laporan keuangan sudah sesuai dengan aktivitas ekonomi yang berlangsung, serta apakah pencatatan tersebut dilakukan dengan benar dan sesuai standar. Auditing juga berperan penting dalam memastikan legalitas dan keakuratan data keuangan (Prayogo et al., 2021).

Auditing atau pengawasan bertujuan untuk memastikan keakuratan transaksi keuangan dan mencegah terjadinya kesalahan atau kecurangan dalam pengelolaan anggaran pendidikan. Dengan adanya audit yang dilakukan secara berkala, lembaga pendidikan dapat menjaga integritas keuangan mereka dan meningkatkan

kepercayaan publik terhadap transparansi serta akuntabilitas lembaga tersebut. Proses ini juga membantu dalam mengevaluasi efektivitas pengelolaan dana pendidikan dan memberikan rekomendasi perbaikan jika ditemukan ketidaksesuaian atau masalah dalam pencatatan keuangan.

Secara keseluruhan, tujuan utama dari manajemen pembiayaan pendidikan adalah untuk meningkatkan penggalan sumber dana bagi lembaga pendidikan, menciptakan pengendalian yang tepat atas sumber daya keuangan, meningkatkan efektivitas dan efisiensi, serta memastikan akuntabilitas dan transparansi keuangan. Manajemen yang baik akan memastikan bahwa dana pendidikan dikelola secara selektif dan tepat sasaran, sehingga mendukung pencapaian tujuan pendidikan yang berkualitas dan merata. Pengelolaan yang transparan juga akan memberikan kepercayaan lebih kepada pihak-pihak yang berkepentingan, baik dari internal lembaga maupun masyarakat luas (Magdalena, 2020).

Dengan manajemen pembiayaan pendidikan yang terstruktur, sistem keuangan di lembaga pendidikan menjadi lebih terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini adalah kunci untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan benar-benar digunakan untuk kepentingan pendidikan dan tidak disalahgunakan. Pada akhirnya, pengelolaan anggaran yang baik akan membantu menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik dan mendukung peningkatan kualitas pendidikan di berbagai lembaga.

Prinsip manajemen pembiayaan dalam menunjang penyelenggaraan pendidikan Islam

Upaya mengelola keuangan pendidikan, sangat penting untuk memperhatikan beberapa prinsip utama, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 59. Prinsip-prinsip tersebut mencakup keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai landasan untuk memastikan bahwa pengelolaan dana pendidikan dilakukan dengan benar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, pengelola lembaga pendidikan dapat memberikan layanan pendidikan yang berkualitas serta memastikan bahwa anggaran yang tersedia digunakan secara optimal..

Transparansi merupakan salah satu prinsip yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan pendidikan. Transparansi mengacu pada keterbukaan dalam proses pengelolaan, terutama terkait dengan sumber dan jumlah dana yang diterima, rincian penggunaan dana tersebut, serta laporan pertanggungjawabannya. Transparansi ini penting karena dapat memberikan kepercayaan kepada semua pihak yang berkepentingan, termasuk masyarakat, guru, dan pemerintah. Ketika dana pendidikan dikelola dengan transparan, pemangku kepentingan dapat memantau

kondisi keuangan lembaga pendidikan dengan jelas, sehingga tidak ada keraguan terkait penggunaan anggaran (Jualianti et al, 2022).

Prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pendidikan juga tidak kalah pentingnya. Akuntabilitas berarti bahwa pengelola keuangan harus mampu mempertanggungjawabkan setiap penggunaan dana yang telah direncanakan. Ini mencakup penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar, serta pelaporan secara terbuka kepada pihak-pihak terkait. Menurut Sulistiyono, setidaknya ada tiga syarat yang harus dipenuhi oleh pengelola keuangan untuk mencapai akuntabilitas, yaitu adanya transparansi dari pihak penyelenggara sekolah, standar kerja yang jelas, dan partisipasi pengelola dalam menciptakan suasana yang kondusif (Kembaren et al, 2021).

Prinsip efektivitas juga sangat penting dalam manajemen keuangan pendidikan. Efektivitas mengacu pada pencapaian tujuan yang sesuai dengan perencanaan awal. Tidak hanya sampai pada tujuan jangka pendek, efektivitas juga mencakup pencapaian visi jangka panjang yang telah ditetapkan oleh lembaga pendidikan. Dalam konteks ini, efektivitas berarti bahwa setiap program yang dijalankan harus memiliki dampak positif yang nyata bagi kualitas pendidikan dan pengembangan siswa, serta dapat diukur secara objektif (Suarjana, 2021).

Penerapan prinsip efektivitas dalam pengelolaan keuangan pendidikan juga harus memperhatikan efisiensi penggunaan sumber daya. Dana yang ada harus digunakan sebijak mungkin untuk mencapai hasil maksimal tanpa pemborosan. Ini dapat dicapai dengan melakukan perencanaan yang matang, memprioritaskan program-program yang memiliki dampak besar, serta memastikan bahwa setiap keputusan keuangan didasarkan pada data yang valid dan analisis yang cermat. Dengan demikian, efektivitas dan efisiensi akan berjalan seiring dalam memastikan pengelolaan keuangan pendidikan yang optimal (Agusti, 2022).

Secara keseluruhan, prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas merupakan pilar penting dalam manajemen pembiayaan pendidikan. Ketiga prinsip ini harus diterapkan secara konsisten agar pengelolaan keuangan di lembaga pendidikan dapat berjalan dengan baik, efisien, dan memberikan dampak positif yang nyata bagi perkembangan pendidikan di Indonesia. Dengan mematuhi prinsip-prinsip tersebut, lembaga pendidikan dapat menjaga kepercayaan masyarakat, meningkatkan kualitas layanan pendidikan, serta mencapai visi jangka panjang yang telah ditetapkan.

KESIMPULAN

Manajemen pembiayaan pendidikan yang baik harus memperhatikan prinsip-prinsip utama seperti transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas. Transparansi memastikan bahwa pengelolaan dana terbuka dan dapat diakses oleh pihak-pihak

yang berkepentingan, sehingga meminimalisir kemungkinan terjadinya penyalahgunaan dana. Akuntabilitas menekankan pentingnya pertanggungjawaban atas penggunaan dana sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan, sehingga setiap pengeluaran dan penerimaan dapat dipertanggungjawabkan secara jelas. Efektivitas, di sisi lain, memastikan bahwa setiap dana yang digunakan dapat mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dengan optimal dan efisien.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, lembaga pendidikan dapat mengelola sumber daya keuangan mereka secara lebih terstruktur dan akurat, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Pengelolaan keuangan yang efisien, transparan, dan akuntabel tidak hanya memperkuat kepercayaan publik, tetapi juga menciptakan dasar yang kuat bagi pencapaian visi jangka panjang lembaga pendidikan. Ini memungkinkan lembaga pendidikan untuk berkembang dan memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat, serta mendukung tercapainya pendidikan yang lebih merata dan berkualitas di Indonesia.

REFERENSI

- Abdulatif, S. (2021). Dampak pandemi terhadap eksistensi pendidikan di era digital. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(1), 1567-1570.
- Agusti, E., Kurnia, R., & Puspitasari, E. (2022). Pengaruh Efektivitas Pembelajaran Jarak Jauh Terhadap Motivasi Belajar Anak Usia 5-6 Tahun di Masa Pandemi Covid-19 Di TK FKIP UNRI. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 16515-16524.
- Amalia, N. R., & Syaipudin, L. (2024). Capital Market Reaction to the 2019 Indonesian Presidential Election in Advertising and Advertising Companies. *Demagogi: Journal of Social Sciences, Economics and Education*, 2(1), 22-32.
- Darsono, H., Fitri, A. N., Rahardjo, B., Imanuela, M. Z., & Lasambouw, C. M. (2020, September). Efektivitas Pembelajaran Jarak Jauh saat Pandemi Covid-19 (Kajian di Politeknik Negeri Bandung). In *Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar* (Vol. 11, No. 1, pp. 1235-1240).
- Farida, A. L. N., Alim, F., Maulana, H., Huda, V. S., & Syaipudin, L. (2023). Contextualization of Educational Management in the School, Family and Social Environments: Literature Study on the Concept of Islamic Education. *Beginner: Journal of Teaching and Education Management*, 1(2), 50-64.
- Faida, E. N., & Syaipudin, L. (2024). Analisis Cadangan Premi Asuransi Jiwa Menggunakan Metode ARIMA. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Modern dan Tradisional*, 1(1), 39-46.
- Julianti, I., Iskandar, D., Hamdani, A. R., & Nurlaila, N. (2022). Analisis Efektivitas Pembelajaran Jarak Jauh Di Sekolah Dasar. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 8(1), 576-596.

- Kembaren, F. R., Sakinah, W. L., Septiannur, H., & Putri, J. K. (2021). Efektivitas Pembelajaran Jarak Jauh dengan Memanfaatkan Teknologi pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 5(1), 686-691.
- Kurniasih, N., Hidayani, F., Muchlis, A., & Soebagyo, J. (2021). Analisis kemandirian belajar matematika siswa SMA kelas XI selama pembelajaran jarak jauh. *International Journal of Progressive Mathematics Education*, 1(2), 117-126.
- Magdalena, I., Erdian, A. E., & Marcelino, R. (2020). Analisis Efektivitas Pembelajaran Jarak Jauh di Masa Pandemi Covid-19 di SD Negeri Poris Pelawad 03 Kota Tagerang.
- Moleong, L. J. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosda Karya, Bandung.
- Najib, M. A., Syaipudin, L., & Luthfi, A. (2024). Pembinaan Guru dengan Supervisi Ilmiah dalam Perspektif Pendidikan Islam. *Jurnal Ilmiah Pengayaan Pembelajaran dan Pendidikan Islam*, 1(1), 1-8.
- Najib, M. A., Awwalin, I. N., & Syaipudin, L. (2024). Manajemen Pengelolaan Infrastruktur Pendidikan dalam Menyambut Era Digitalisasi 5.0; Studi di MTs Negeri 1 Tulungagung dan MTs Darul Falah Tulungagung. *Jurnal Ilmiah Pengayaan Pembelajaran dan Pendidikan Islam*, 1(1), 9-22.
- Pratama, M. R., Ramadan, Z. A., Solichah, I., Sari, S. A. N. W., Jannah, S. N., & Syaipudin, L. (2023). Applicability of Islamic Education Philosophy to Educational Level Units from an Islamic Studies Perspective. *ATTAQWA: Jurnal Pendidikan Islam dan Anak Usia Dini*, 2(4), 179-189.
- Prayoga, A. S., Waitau, E. K., Jannah, M., Ardana, R. S., & Rachamaningrum, F. (2021). Efektifitas Pembelajaran Jarak Jauh dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 12-21.
- Sandre, H. I., Paat, W. R. L., & Pratasik, S. (2021). Analisis Pembelajaran Daring Pada SMK. *Edutik: Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi*, 1(1), 90-96.
- Sari, L. K., & Madio, S. S. (2021). Kesulitan belajar matematika siswa melalui pembelajaran jarak jauh. *Plusminus: Jurnal Pendidikan Matematika*, 1(3), 409-420.
- Secahyanti, N., Syaipudin, L., & Tohiri, K. (2024). Efektivitas Media Interaktif Radio pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMPN 1 Kedungwaru Tulungagung. *Jurnal Ilmiah Pengayaan Pembelajaran dan Pendidikan Islam*, 1(1), 40-47.
- Suarjana, S. K. E. (2021). Pemberdayaan Radio Komunitas Sekolah Sebagai Media Belajar Di SMP Negeri 2 Susut pada Masa Pademi Covid-19. *Jurnal Syntax Transformation*, 2(02), 234-243.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penulisan Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung. CV Alfabeta.

- Syaipudin, L., Akhyak, A., & Aziz, A. (2024). Madrasah Relevance Management Efforts and the Digital Era (Study at MI Miftahul Ulum Banggle 02 Kanigoro Blitar and MI Al Muhajirin II Latukan Karanggeneng Lamongan). *International Journal of Management Science*, 2(1), 23-34.
- Syaipudin, L., & Luthfi, A. (2024). Peran Guru dalam Aplikatif Model Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Bagi Anak Berkebutuhan Khusus pada Sekolah Luar Biasa. *Jurnal Ilmiah Insan Mulia*, 1(1), 27-33.
- Waruwu, E., Ndraha, A. B., & Lase, D. (2022). Peluang dan tantangan G20 dalam transformasi manajemen pendidikan di era revolusi industri 4.0 dan civil society 5.0 pasca pandemi covid-19. *Jurnal Ilmiah Maksitek*, 7(3), 26-32.